

DAFTAR PUSTAKA

Absori dkk, 2015, *Hukum Profetik Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 317

Adolf, Huala. (2002). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 35

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 137-140

Agus Saantoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 91

Alexander Moseley, "Political Philosophy," *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/polphil/>, diakses pada 27 Juni 2020, pukul 00.27 WIB.

Ali Muhayyar, "*Superioritas Wakil Rakyat; Hak dan Kewajiban Wakil Rakyat Menurut Thomas Hobbes*," <http://poetraboemi.wordpress.com/2008/03/04/superioritas-wakil-rakyat-hak-dan-kewajiban-wakil-rakyat-menurut-thomas-hobbes/>, diakses pada 10 Juli 2020, pukul 09.44 WIB.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 30

Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 163-164

Andri G. Wibisana, *"Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya,"* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 43, Nomor 1 (Januari 2013), hal. 57.

Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, Semarang 4 Februari 2010

Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association), *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992, hal. 46

Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

Astim Riyanto, 2009, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, hlm. 67.

Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

Ateng Syafrudin, *"Azas-Azas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah"*, dalam Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), penyusun: Paulus Efendi Lotulung, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994): hal. 38-39.

Awarta, I. Gusti Putu Diva and Fatma Ulfatun Najicha. Et.all, 2018 *Politic of Legislation in Indonesia About Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice*. Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol 6. Page 1430

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 147.

Bagir Manan, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 12.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994): hal. 76-77.

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI-2005, Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEK HUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret 2005, hal. 15; Peter Gillies, Ed. Barda Nawawi Arief, *Criminal Law*, (Jakarta: 1990), hlm. 125; Lobby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, (Jakarta: Datacom, 2002), hal 34-35.

Baxter, Brian (2005). *A Theory of Ecological Justice*. New York :Routledge. Hlm 2

Bradley, A.W., *The Ombudsman and the Protection of Citizens' Rights*, in Gerald E. Caiden (ed.), *International Handbook of the Ombudsman: Evolution and Present Function* (Westport, Connecticut: Greenwood Press).

Bunyan Bryant (ed.), *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, Washington D.C., Covelo, California: Island Press, 1995, page. 6

Burhan Ashshofa.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 66

Carl Pietsch, "Regimes of Nature – the Human Challenges of Ecological Restoration", *Humanist*, Nov- Dec, 1993, hal.4.

http://findarticles.com/p/articles/m1374/is_n6_v53/ai_14289333. Diakses 6 Juli 2020

Caroline Walsh, “*Rawls and Walzer on Non-Domestic Justice*,” *Contemporary Political Theory*, 24 Juli 2020, pukul 20.53 WIB.

Charter for the Environment 2004 disahkan pada tanggal 1 Maret 2005, dan selanjutnya ditambahkan menjadi materi Preamble Konstitusi pada tahun 2006. Lihat www.cidce.org/pdf/Charte_ANGLAIS.pdf.

Christoph D. Stone, “*Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*,” William Kaufmann, Los Altos, 1974, lihat dalam *Earth and Other Ethics*, Harper & Row, New York, 1987, hal.1.

Christian Tomuschat, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2003, hlm. 48.

Clare Kendall, *A new law of nature: Ecuador next week votes on giving legal rights to rivers, forests and air. Is this the end of damaging development?* The world is watching, The Guardian, Wednesday 24 September 2008.

CNN Indonesia, “*ESDM Desak Gubernur Cabut Ratusan Izin Tambang Bermasalah*” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109155055-85-359627/esdm-desak-gubernur-cabut-ratusan-izin-tambang-bermasalah>, diunduh 15 Mei 2020.

Cornelis Lay, “*Lembaga Kepresidenan Di Indonesia*”, dalam *Tidak Tak Terbatas Kajian Atas Lembaga Kepresidenan RI*, (Yogyakarta: Pandega Media dengan BEM UGM, 1997) : hal. 12.

Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara, September 2019, hlm. 12.

Dahlain Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 17.

Daily News Indonesia, <https://www.dailynewsindonesia.com/news/hukum/pan-uu-minerba-bukti-dpr-bela-kepentingan-oligarki-dan-istana>, diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 22.10 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 bahwa “teori” artinya: 1. Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; 2. Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; 3. Azas dan hukum yang umumnya yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; 4. Pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Danusaputro, Munadjat. (1980). *Hukum Lingkungan*, Buku 1 Umum. Jakarta: Binacipta. Hlm 67

David Marrani, *Human Rights and Environmental Protection: The Pressure of the Charter for the Environment on the French Administrative Court*, lihat digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi.

Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Azasi manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

Dewan Perwakilan Rakyat, “*Masalah Illegal Mining* tidak tersentuh Aparat Penegak Hukum”
<http://dpr.go.id/berita/detail/id/22043/t/Masalah+%E2%80%9CIllegal+Mining%E2%80%9D+Tidak+Tersentuh+Aparat+Penegak+Hukum>

Didid NazmiYunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992): hal.26.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, “*Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.*” Bahan presentasi diskusi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan Publish What You Pay Indonesia

(PWYP), Jakarta, 29 Agustus 2017. Slide 8-9.
<https://www.slideshare.net/pwypindonesia/efektifitas-pengawasan-dan-penegakan-hukum-sektor-pertambangan-mineral-dan-batubara>, diunduh 12 Mei 2020.

Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara: *Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 943.

Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang, UBB Press, hlm. 28

Dwi Haryadi, 2015, *Membangun Kebijakan Kriminal Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Pertambangan mineral dan batu bara Yang Mensejahterakan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Indonesia* (Ringkasan Disertasi), Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 19.

Edward Clayton, "Aristotle: Politics," Internet Encyclopedia of Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/aris-pol/>, diakses pada 25 Juli 2020, pukul 20.35 WIB

Eko Bisnis. "Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang IUP Masih Rendah" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/44/1192367/jaminan-reklamasi-dan-pasca-tambang-iup-masih-rendah>, diunduh 15 Mei 2020.

Eko Nurardiansyah, 2015, Konsep Hijau: *Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy* Jurnal Veritas Et Justitia Vol. No 1 2015.

Enny Nurbaningsih, 2015, *Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan terkait Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015

F.P.C.L. Tonnaer, *Handboek van het Nederlands Milieurecht: Boek 1* (Utrecht: Lemma, BV, 1994), hal. 601. Holck dkk, izin yang diintegrasikan ke dalam izin Wm meliputi izin emisi ke udara, pelepasan limbah (termasuk limbah cair) ke tanah, minimasi limbah, penghematan energi, dan penanggulangan kebisingan atau kemacetan. Anders Kristian Holck, Pia Jørgensen, dan Kristian Schou, *“Environmental Regulation and Integrated Permit Systems: A Comparative Study of Industrial Regulation in Denmark, England, and the Netherlands”*, Master Thesis, Department of Environment, Technology, and Social Studies, Roskilde University, 2002, tersedia pada: <<http://www.opgavebank.dk/opgaver/111.pdf>>, hal. 89-90.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

Focseneanu, Veronica, *“Walls, Sovereignty and Nature”*, Ecological Security in an Interdependence World”.

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.207.

Franz Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 211.

Fred Hobma dan Yuka Shiba, *“Deregulation in City Planning and Development Law: The New Dutch Environmental Permit (Omgevingsvergunning)”*, The Journal of the Land Institute, Vol.18(3), Sumer, 2010, hal. 5.

Fritjof Capra, 2003, *The Hidden Connections*, Flamingo, London.

G Tiess and S Mujiyanto, *Mineral Resources Policies and Governance in Indonesia*, (July 2019) hlm.18.

H. Juhaya S. Praja, *Filsafat Manajemen*, ctk.Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.51

commit to user

- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Walton Street, Oxford: Oxford University Press, 1961, page. 155.
- H.R.Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, ctk.Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.21
- H.Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 7
- Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.6
- Hanna Dürtge Tolsma, “Improving Environmental Permitting Systems: Integrated Permits in the Netherlands”, *International Public Administration Review*, Vol. XII (2–3), 2014, hal. 86-87.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1999). *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan Keenambelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hartiwiningsih, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. UNS Press. Universitas Sebelas Maret, Hlm 25
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni: 64-65).
- Henry S. Richardson, “John Rawls,” *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/rawls/#SH2d>, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 22.19 WIB.
- Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Hal. 323-324.

Hillier, Tim. (1998). *Sourcebook on Public International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, The Glass House, & Wharton Street Ltd.

<https://jurnalbumi.com/ktt-bumi/>

<https://nasional.kompas.com> diakses pada 16 Mei 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/15401181/jatam-pembahasan-ruu-minerba-tak-libatkan-masyarakat-lingkar-tambang>, Diakses Pada 17 Mei 202

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/24/17392071/uu-minerba-dinilai-jadi-bukti-pemerintah-tak-berpihak-pada-lingkungan-dan?page=all> diakse pada 16 Mei 2020

<https://pushep.or.id/pushep-kinerja-legislasi-di-sektor-energi-dan-tambang-nihil/>. Lihat juga <https://pushep.or.id/10-tahun-sejak-2010-kinerja-legislasi-di-sektor-energi-dan-pertambangan-nol-2/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511200232-85-502250/masyarakat-sipil-sebut-revisi-uu-minerba-sisakan-masalah>, diakses Pada 20 Mei 2020.

<https://www.jatam.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/> diakses Pada 18 Mei 2020.

<https://www.jatam.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/> diakses Pada 18 Mei 2020.

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/13/uu-minerba-ketok-palu-jaminan-korporasi-ancaman-bagi-rakyat-dan-lingkungan/> diakses pada 16 Mei 2020

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/13/uu-minerba-ketok-palu-jaminan-korporasi-ancaman-bagi-rakyat-dan-lingkungan/>. diakses Pada 19 Mei 2020.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2012. *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola*

Pemerintahan Yang Baik Di Daerah. Jurnal Yustisia Vo. 1 No 1 Januari – April 2012.

I Gusti Ayu. *Green constitution sebagai penguatan norma hukum lingkungan Dan pedoman legal drafting peraturan daerah dalam rangka praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Jurnal Yustisia* Vol.1 No.1 Januari – April 2012. Fakultas Hukum UNS : Surakarta. Hlm 135

I Gusti Ayu. *Teori dan Praktek Legal Drafting Peraturan Daerah. Cetakan II.* Surakarta. Cakra Books. Solo. Hlm 34

Irwansyah, Wardhani Hakim, Dkk, 2017. *Environmental audit as instrument for environmental protection and management. Jurnal The Business & Management Review. The Academy of Business and Retail Management (ABRM).* Vol 9, Issues 2. Hlm 228-232.

Irwansyah, Marlang. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum.* Learning Book of Law Faculty of Hasanuddin Makassar.

I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, Malang, 2006, hal.77

I Nyoman Nurjaya, “*Adat Community Lands Right As Defined Within the State Agrarian Law of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Legal Recognition?*”, dalam the US-China Law Review Volume 8, Number 4, April 2011, David Publishing Company, Illinois, USA.

Industri Kontan, “*Peralihan Wewenang ke pusat dalam Omnibus Law Minerba Berpotensi Temui Masalah*” <https://industri.kontan.co.id/news/peralihan-wewenang-ke-pusat-dalam-omnibus-law-minerba-berpotensi-temui-masalah>

Ingrid Robeyns, “*The Capability Approach*,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/>, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 21.34 WIB.

Istilah "negara" dalam istilah "penguasaan negara" mengacu pada pemerintah pusat yang dipilih secara teratur oleh rakyat. Hal ini mengurangi gagasan bahwa penguasaan sumber daya alam ada di tangan negara, dan kepemilikan sumber daya alam (hak milik mineral) ada di tangan rakyat. Selain itu, hak pertambangan ada di tangan pemerintah, dan hak ekonomi di tangan pelaku usaha

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 79.

Jantam.Org. 143 Anak Mati Sia-Sia di Lubang Tambang’ <https://www.jatam.org/2019/03/20/143-anak-mati-sia-sia-di-lubang-tambang/>, diunduh 15 Mei 2020.

Jaringan Advokasi Tambang, “*Catatan akhir tahun 2019 dan proyeksi 2020, oligarki tambang menghancurkan syarat-syarat kesela- matan rakyat dan infrastruktur ekologis di Indonesia*,” (Jakarta: JATAM, 2020), hlm. 16

Jarot Digdo Ismoyo, 2018. *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Desertasi Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta., hlm ix

Jay. A. Sigler, Beede and Rutgers, op. cit., hal. 4

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah salah seorang penganut aliran utilitarianisme di Inggris dikenal sebagai pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum Inggris yang

baginya merupakan sesuatu yang kacau. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat. Kontribusi terbesarnya adalah di bidang kejahatan dan pembedaan. Dalilnya adalah bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai disini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Lihat: Satjpto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 275

Jhon Bodley, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 80.

John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2006), hlm. 4

John B. Cobb Jr., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1992, page. 56-58.

John D. Burrow dan Frank J. Tipler dalam artikelnya yang berjudul “*The Anthropic Cosmological Principle*.” Lihat: Opcit. 105., hal. 16-17.

John Finnis, “*Aquinas’ Moral, Political, Legal Philosophy*,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/aquinas-moral-political/#Jus>, diakses pada 19 Mei 2020, pukul 13.57 WIB

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma. Hlm 62

commit to user

Karl Weber, "*Public Environmental Law in Austria*", dalam: René Seerden dan Michiel Heldeweg (eds.), *Comparative Environmental Law in Europe: An Introduction to Public Environmental Law in the EU Member States* (Antwerpen: Maklu, 1996), hal. 3-31

Kasper Lippert-Rasmussen, "*Justice and Bad Luck*," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/justice-bad-luck/>, diakses pada 27 Juni 2020, pukul 00.46 WIB.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, (KLHK: Jakarta, 2018), hlm. 7

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
<http://www.menlingkunganhidup.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/>

Kepaniteraan MK RI, 2006, Teori Hans kelsen tentang Hukum, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta. hlm.13

Kirdi Dipoyudo, *Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila*, Jurnal Analisa CSIS, tahun XV, No. 8 Agustus 1996

Kompas.com
<https://regional.kompas.com/read/2011/01/28/04342854/Masyarakat.Berhak.>

Kompas.com dengan judul "*UU Minerba Dinilai Jadi Bukti Pemerintah Tak Berpihak pada Lingkungan dan Rakyat*", <https://nasional.kompas.com/read/>

2020/06/24/17392071/uu-minerba-dinilai-jadi-bukti-pemerintah-tak-berpihak-pada-lingkungan-dan?page=all. Diakses pada 24 Juni 2020.

Kusumaatmadja, Mokhtar. (1999). *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Internasional FH UI. Hlm 11

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Sociology Science Perspective*, dalam Soerjono Soekanto, et. all., 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lego Karjoko, Djoko Wahyu Winarno, Dkk., 2020. *Spatial planning dysfunction in East Kalimantan to support green economy. International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol 11., Issue 8. Hlm 259-269

Leif Wenar, "John Rawls," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/rawls/#TwoPriJusFai>, diakses pada 26 Juli 2020, pukul 22.01 WIB

Leslie Green, "Legal Positivism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/>, diakses pada 27 Juli 2020, pukul 19.54 WIB.

M. Endriyo Susila et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hlm. 40-41

M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, ctk.Ketiga, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014, hlm.5.2

Mahmakah Konstitusi, 2008, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK, hlm.6

Majalah Tempo “*Siapa diuntungkan Pengesahan Revisi UU Minerba*”

<https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160529/siapa-diuntungkan-pengesahan-revisi-uu-minerba> , diunduh pada 1 Juni 2020

Majda El Muhtaj, Supra Catatan No. 26, hlm. 193.

Margreet G. Hordijk, “*Deregulation and Harmonization of Environmental Law in The Netherlands: The Dutch Environmental Management Act*”, makalah disampaikan pada “*Indonesian- Netherlands Seminar on The Development of Environmental Law and Environmental Management, within the Framework of Harmonization. Deregulation, and Decentralization*”, Jakarta, 1996, hal.1.

Maria SW Sumardjono, 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, 14 Februari 1998

Mas Achmad Santosa, *Hak Azasi manusia dan Lingkungan Hidup, dalam ICEL Staff Articles*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1997.

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik (Hukum Hak Azasi manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 53.

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, Supra Catatan No. 31, hlm. 54-55.

Masyhur Effendi, *Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup*, FH Universitas Brawijaya, Malang, 1986, hlm. 35.

Meinhard Schroder, 1996, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, hlm.12

Mela Hapsari, '*Lagi! Jatuh Korban ke-37 di Lubang Bekas Tambang Batu Bara di Kaltim,*' <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indra-hapsari/lagi-jatuh-korban-ke-37-di-lubang-bekas-tambang-batu-bara-di-kaltim>, diunduh 28 Mei 2020.

Michael Curtis, *The Great Political Theories*, Volume 1: From Plato and Aristotle to Locke and Montesquieu, New York: Avon Books. 1981, page. 336.

Michael Slote, "*Justice as a Virtue*," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/justice-virtue/#5>, diakses pada 24 Juli 2020, pukul 20.53 WIB.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1999. Hlm 137-139

Moh, Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 349

Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 51.

Mudakir Iskandarsyah, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta.

Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2011, Ekologi Kontitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.41

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1981

Munajat Danuseputro, 1982, *Hukum Lingkungan*, Global, Bina Cipta, Bandung, hlm.70.

Najicha, Fatma Ulfatun, Dkk. 2020. Legal Protection “*substantive Rights for Enviromental Quality*” on Enviromental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia. Atlantis Press.

Najicha, Fatma Ulfatun, 2020 The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. Vol 24, Issue 7. Page 8629-8638

Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 38

Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), h, 81.

Need Green Revolution, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 237.

Netherlands Commision for Environmental Assessment, “*Environmental Strategic Impact Assessment and Strategic Environemn- tal Assesement for a Responsible and Inclusive Mining Sector*”, 2017, hlm. 5

Nisha Shah, “*Beyond Sovereignty and the State of Nature*”, *Annual Meeting of the International Studies Association*, San Diego, 2006.
http://www.academic.com/meta/p99286_index.html.

Notonagoro dalam Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 53

Notonagoro, 1962. *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Penerbitan mengenai Pancasila I, II, III

Notonagoro, 1971, *Pengertian Dasar Bagi Pedoman Implementasi Pantjasila Untuk ABRI*, Dep Hankam, Jakarta.

Notonagoro, 1972, *Generasi Muda Dan Ketahanan Nasional*, Sema Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Notonagoro, 1975, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pancuran Tujuh, Jakarta. Hlm 56

Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta. Hlm 15

Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta. Hlm 15

OECD, “*Spatial Planning Instruments and the Environment*”, OECD SPINE Project, hlm. 2.

OJ L. 24, 29.1.2008, *Directive 2008/1/EC concerning integrated pollution prevention and control* [selanjutnya disebut *Directive No. 2008/1/EC*], Bagian Konsiderans Paragraf 18. Di dalam Pasal 1 angka 12, *Directive No. 2008/1/EC*

Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Semarang, Thafa Media, hlm. 24-25.

Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta, Thafa Media, hlm. 192

P.C. Gilhuis dan J.M. Verschuuren, “*Environmental Law*”, dalam: Jeroen M.J. Chorus, et al. (eds.), *Introduction to Dutch Law* (The Hague: Kluwer Law International, 1999), hal. 361-367.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 8A Perubahan UU No. 4 Tahun 2009, RTRW dan/atau rencana zonasi menjadi hal yang diper- timbangkan dalam

penyusunan RPMBN. Namun, tidak dapat dipastikan sejauh apa RTRW dan/atau rencana zonasi ini menjadi pertimbangan dan dikhawatirkan hanya menjadi syarat administratif. Seharusnya, tata ruang bukan hanya menjadi pertimbangan, namun RPMBN perlu mengintegrasikan substansinya dengan RTRW maupun rencana zonasi.

Pan Mohamad Faiz., 2016. *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi.. Volume 13 Nomor 4, Desember Tahun 2016.

Paul Wapner, *"The Sovereignty of Nature? Environmental Protection in a Postmodern Age"*, International Studies Association, vol.46, no.2, pages 167-187, International Studies Association. Blackwell Publishing, 2002

Peambule Konstitusi Perancis berubah menjadi sebagai berikut: *"The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004"*. "

Penjelasan Umum PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peter C. List (ed.), *Radical Environmentalism: Philosophy and Tactics*, Belmont, California: adsworth, 1993, hlm. 11.

Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law: Vol. 1, Frameworks, Standards, and Implementation* (Manchester University Press, 1995), hal. 199. Lihat juga Wibisana, *ibid*.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 45-46.

commit to user

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Op. Cit., hlm. 78.

Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola, 2006), Hal. 655.

PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 2.

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 23 s.d. 27, Pasal 63 s.d. 68.

PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang, diatur ketentuan penempatan dana reklamasi dan/atau pasca tambang

Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, , 2011, Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam Buku; Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 33

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.10/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “*Pertambangan Mineral dan Batubara*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959. Riant Nugroho D, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 50.

Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 105.

- Ronny Andrie Maramis, 2013. *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*. Desertasi Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar., hlm 6
- Roy Gregory dan Philip Giddings, 2001, *Citizenship, Rights and the EU Ombudsman*, dalam Richard Bellamy dan Alex Warleigh (editor), *Citizenship and Governance in the European Union*, Continuum, London-New York, hlm. 73.
- Roy Gregory dan Philip Giddings, Supra Catatan No.32, hlm. 73.
- Safitri, Myrna A.2013. “*Menafsirkan tanggung jawab negara terhadap reforma agraria*”, dalam: Ismatul Hakim dan LukasR. Wibowo (eds.), *Jalan terjal Reforma Agraria di sektor kehutanan*. Jakarta: Puspipjak.
- Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm.8
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 2, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007, hlm. 11.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982, hlm. 113.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 19-20.
- Seoemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. Hlm 17-31
- commit to user*
- Setiono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press. hlm 21

Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, 2013, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Yogyakarta, Danadyaksa, hlm. 3.

Sharon Beder, *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction* (Earthscan, 2006), hal. 18. Lihat juga Wibisana, Ibid., hal. 86-87.

Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", *Jurnal ComTech* Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992): hal.6

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed. I, Cet. 16, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 50.

Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 33

Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.6.

Soetandyo Wignjosoebroto. 1987. *Hukum dan Metode Kajiannya*, BPHN, Jakarta, 1980, hlm 89

Soetandyo Wignjosoebroto. *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas, hlm. 200-205

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.

Strong, C.F. (1963). *A History of Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson

Stuart G. Gross, 2003, "*Inordinate Chill: Bits, Non-Nafta Mits, and Host-State Regulatory Freedom-An Indonesian Case Study*", Michigan Journal of International Law, University of Michigan Law School, h.5.

Stuart White, "Social Minimum," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/social-minimum/#2.4>, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 23.15 WIB.

Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

Sudharto P.Hadi, 2001, *Dimensi lingkungan perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta, Gadjah Mana University Press. hlm. 44. Baca juga Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 50

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

Susi Dwi Harijanti, 2011, *Ombudsman dan The Right to Good Administration, dalam Elly Erawaty, dkk. (editor)*, Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 373.

- Sutaryo Sigit, *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia, 1994, hal.26
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. hlm 110
- Syailendra Persada, '4 Kali Amandemen UUD 1945, Ini Perubahannya', Tempo, 12 August 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1234816/4-kali-amandemen-uud-1945-ini-perubahannya>, diunduh pada 26 Mei 2020.
- T. Brenton, *The Greening of Machiavelli: the Evolution of International Environmental Politics* (London: Earthscan, 1994), hal. 18-19.
- TEEB, *The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers*, 2010, hlm. 108.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982, hlm. 29.
- Thomas L. Friedman, 2009, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 237.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 13.
- Tri Hayati, *Perizinan Pertambangan dalam Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi kasus tentang Perizinan Pertambangan Timah*. Jakarta : Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal.62
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1954 Pasal 33 Ayat 3
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam www.setneg.go.id diakses tanggal 2 Februari 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terakhir diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

United Nation. United Nations Frameworks Convention on Climate Change 2010. Felt The Heat dalam http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2917.php diakses tanggal 3 Mei 2020

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96.

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 71A.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 6 ayat (1).

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 2 huruf c

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Penulis, 2014, hlm 259.

UUD NRI 1945, Pasal 18 ayat (5).

Waluyo, Fatma U N, Sapto H., 2019. *Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945*. 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019). Atlantis Press

Weston, Burns H., Richard A. Falk, dan Anthony D'Amato, *International Law and World Order: A Problem – Oriented Coursebook*, Saint Paul, West Publishing Co, 1990, hlm 18.

commit to user

Wheare, K. C. (1975). *Modern Constitution*. London: Oxford University Press

Winarni, Budi, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Caps, Yogyakarta.

Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), Hal. 7.

